

### **BAB III** **DINAMIKA KHITTAH** **DALAM IMPLEMENTASI** **MENUJU REORIENTASI POLITIK**

Pada dasarnya, perjalanan khittah dapat diperiodisasikan dalam dua tahap. Tahap pertama, meliputi masa 1984-1989, yaitu periode sosialisasi dan konsolidasi khittah. Dan tahap kedua dari 1989-1994, adalah periode pemantapan khittah. Tahap lima tahun pertama dapat dikatakan mewarisisi warna-warnai reorientasi program, regenerasi, dan rekonsolidasi dari Muktamar Situbondo. Ketiga hal itu adalah sub-sub tema yang mengikuti tema besar "kembali ke khittah 1926", yang bukan saja telah membawa NU kepada perwajahan baru, namun juga mengantarkan pada era yang sarat dengan permasalahan dan persilangan kepentingan. Kondisi ini menyebabkan PBNU yang merupakan produk regenerasi 1984 belum bisa berbuat banyak untuk menunjukkan hasil riil dari pelaksanaan program yang telah disusun. Mereka masih berkutat dengan persoalan sosialisasi khittah untuk menyamakan persepsi semua pihak dalam NU, yang ternyata menjadi pekerjaan yang sangat rumit dan kompleks.

Regenerasi dalam NU sendiri tidak dapat dipahami sekadar sebagai regenerasi antar waktu ketika pengurus sebelumnya yang telah senior dan cukup lama memegang

kendali mestilah diganti dengan yang lebih muda. Regenerasi yang melahirkan nama-nama seperti KH Abdurrahman Wahid, Ma'habub Djunaedi, Fahmi Saifuddin dan seterusnya, dilatarbelakangi oleh permasalahan yang jauh lebih besar daripada sekadar kemestian untuk melaksanakan mekanisme suksesi kepengurusan. Backdrop proses ini adalah berkaitan dengan maraknya konflik internal NU di masa sebelumnya, yang kurang lebih terjadi sebagai konflik antara kelompok politisi dan ulama non-politisi yang secara populer disebut sebagai konflik Cipete-Situbondo.

Konflik yang nyaris akut ini pada akhirnya melahirkan kesadaran para ulama dan warga NU akan perlunya pemunculan figur baru dalam teras kepemimpinan NU. Figur baru itu harus berada pada posisi netral dalam peta konflik NU, di samping harus mampu menjadi representasi semangat khittah. Berdasarkan kriteria ini maka tujuh orang Kiai senior NU yang dikomandani KH As'ad Syamsul Arifin dalam forum *ahlul hadli wal i'ad* menunjuk Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Tanfidziyah. Tokoh ini bukan saja netral, tapi ia juga secara serius telah turut mengupayakan rekonsiliasi kedua kubu yang bersengketa di era sebelumnya. Selanjutnya, ia adalah seorang figur

<sup>1</sup> sentral dalam perumusan konsep kembali ke khittah 1926.

Dalam banyak hal, ia dipandang cukup mewakili citra "NU baru" yang hendak dimunculkan. Dengan segala latar belakang ini, maka tugas kepungurusan baru NU untuk melakukan sosialisasi khittah menjadi tidak mudah, sebab bias-bias konflik politisi dan ulama non politisi ternyata masih tersisa dalam tubuh NU. Salah satu hal yang harus dijelaskan kepada warga NU adalah bahwa khittah mengamanatkan ditanggalkannya baju politik praktis NU dan dilepaskannya keterikatan NU dengan organisasi politik manapun. Namun gambaran persoalan yang muncul dapat diikhtisarkan bahwa kelompok politisi NU ternyata masih menyimpan keinginan untuk membawa organisasi ini kembali pada politik praktis. Misalnya, muncul gagasan Mahbub Djunaedi tentang "Khittah Plus" beberapa bulan setelah Pemilu 1987. Lontaran pemikiran

<sup>1</sup>Pada Mei 1983 kelompok intelektual muda NU menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri 24 tokoh muda NU,--terkenal dengan nama Majelis 24, yang bertujuan melakukan refleksi terhadap NU, dengan kesepakatan penting terbentuknya "Tim Tujuh untuk Pemulihian Khittah NU 1926". Tim ini terdiri dari Abdurrahman wahid (ketua), HM Zamroni (wakil ketua), Said Budairy (sekretaris), H. Mahbub Djunaedi, Fahmi Saifuddin, Daniel Tanjung dan Ahmad Bagja (anggota), bertugas merumuskan konsep pembenahan dan pengembangan NU sesuai Khittah 1926 serta menyusun pola kepemimpinan NU. Lihat Arief Mudatsir, "Dari Situbondo Menuju NU Baru: Sebuah Catatan Awal", dalam Prisma Nomor Ekstra, 1984, h. 133.

dan semua orang yang berada dalam arus baru NU, yang dalam setiap kesempatan baik melalui pesantren-pesantren maupun forum pengajian umum selalu berusaha memberikan pengarahan kepada warga NU tentang amanat khittah dalam segala implikasinya. Gagasan ini segera berhadapan dengan barikade yang mencegahnya agar tidak menjadi epidemi baru.

#### A. Dinamika Khittah dalam Implementasi

Setelah kembali ke khittah, NU menanggalkan baju politik praktis, dapat segera dipahami warga NU, namun tidak demikian halnya dengan neutralitas NU terhadap ketiga orpol (organisasi politik) dan membebaskan warga NU untuk menentukan orientasi politiknya sendiri. Kesulitan itu muncul di kalangan massa NU. Massa NU yang paternalistik telah terkondisikan untuk selalu meminta fatwa dan petunjuk dari ulama dalam menghadapi persoalan hidup mereka, termasuk saat menentukan politik. Mereka selalu cenderung berbuat dan bertindak secara kolektif dalam sebuah arahan yang jelas. Maka pemberian kebebasan kepada warga NU untuk menentukan pilihan politiknya sendiri adalah bertentangan dengan pola pikir mereka yang paling esensial.

Persoalannya terasa lebih sulit karena kurang dari tiga tahun setelah keputusan kembali ke khittah, warga NU

sudah harus mengujicobakan "kebebasan" yang didapatnya dalam Pemilu 1987. Sebagian Warga NU justru merasa asing dalam suasana yang tanpa arahan kolektif itu, sehingga mereka terdorong untuk terus mencarinya.<sup>2</sup>

Dalam kondisi ketidakmenentuan inilah, seorang politis NU, Mahbub Djunaedi dan kelompoknya pada Pemilu 1987 membuat ulah kampanye pengembosan PPP, sambil langsung maupun tidak langsung, menyerukan warga NU menyeberang ke Golkar. Sikap ini membawa sebagian warga NU pada penafsiran yang salah banwa khittah berarti eksodus dari PPP ke Golkar.<sup>3</sup>

Sikap Mahbub mendapat tantangan Abdurrahman Wahid yang selalu memberikan pemahaman tentang konsep khittah 1926, melalui konsolidasi dan sosialisasi khittah di kalangan warga NU termasuk basis-basisnya di wilayah pedesaan. Abdurrahman selalu menjelaskan bahwa Khittah sebagai manifestasi dari perenungan panjang atas gagalnya program kerakyatan sebagaimana tujuan awal berdirinya. Dalam pidato pembukaan Konperensi Wilayan NU Jawa Timur di sitabondo Agustus 1988, Abdurrahman wahid mengakui bahwa heterogenitas warga NU telah menimbulkan perbedaan

<sup>24</sup> A. Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 1994) h. 132-133.

3 *Publ. No. 429*

pemahaman terhadap khittah, sehingga meskipun telah diputuskan, pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan. Ia memperkirakan bahwa, "Kerja khittah itu lama sekali sampai 20 tahun".<sup>4</sup>

Menyadari bahwa gagasannya dihiaangi, Mahbub lalu menyusun serangkaian upaya bawah tanah untuk menggeser Abdurrahman Wahid bahkan menon-aktifkannya sama sekali. Ia melobi para kiai senior NU seperti KH As'ad. Namun jelas tidak terlalu menherankan jika Mahbub gagal meyakinkan mereka akan gagasan Khittah Plus-nya. Kendati begitu, beberapa kiai setuju dengan gagasan untuk menggeser Abdurrahman Wahid, sebab mereka menilai Abdurrahman Wahid sering mengeluarkan pendapat yang aneh-aneh seperti bahwa pendidikan agama cukup di rumah dan tidak perlu di sekolah, penggantian Assalamu 'alaikum dengan selamat pagi, siang atau malam, menghadiri sidang LSM di luar negeri yang dikatakan mendiskreditkan pemerintah, pidato didepan Sidang Raya PGI (Persatuan Gereja Indonesia); di samping ia dianggap kurang bisa mengorganisir NU, sehingga NU tidak bisa menghimpu jana untuk melaksanakan program Muktamar 1984<sup>5</sup>. Maka pada 7

*Tempo*, 3 September 1988, n. 27.

*Libat Tempo*, 21 November 1987, n. 25-26.

Nopember 1987 di rumah KH Mudjib Ridwan yang merupakan tempat berdirinya NU di surabaya, diadakan rapat Mustasyar yang membahas kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Namun pertemuan itu gagal menghasilkan keputusan karena hanya dihadiri oleh KH As'ad, KH Masykur, H Izzon Rosyadi, dan KH Mudjib sendiri.<sup>6</sup>

Selanjutnya upaya menggeser Abdurrahman Wahid melalui forum Munas dan upaya menggeser Abdurrahman Wahid melalui Konbes NU di Cilacap pada bulan yang sama kembali menemui kegagalan. Sekalipun sejumlah Kiai "konservatif" berusaha menggesernya, namun Abdurrahman Wahid ternyata masih di dukung oleh sebagian besar Kiai senior NU, termasuk Rais Aam KH Achmad Siddiq dan KH Ali Maksum.<sup>7</sup> Bahwa KH As'ad termasuk dalam barisan yang hendak menggusur Abdurrahman Wahid, memang cukup menghorankan. Sebab ia sendiri yang pada 1984 menunjuk Abdurrahman Wahid sebagai ketua PBNU. Pendapat-pendapat aneh Abdurrahman Wahid yang dirujuknya barangkali hanyalah suatu pilihan ketika sebuah alasan perlu dipilih. Di sini hendak diajukan asumsi bahwa boleh jadi As'ad mulai

### *Whitbread, s.*

<sup>7</sup>Kahirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah: Prospek dengan Muhammadiyah* (Yogyakarta: NW Mandala, 1992) h. 140-144.

kecewa pada Abdurrahman yang tidak juga tuntas mengembalikan otoritas ulama pada porsi yang seharusnya sebagaimana diseyogyakan oleh khittah. Salah satu pilah khittah adalah meninggalkan peran kepemimpinan ulama yang setidak-tidaknya sejak tahun 1952 telah terus menerus merosot dalam NU. Dan upaya ini ternyata, seperti yang terlihat dalam usaha sosialisasi khittah yang kebanyakan diambil peran kalangan muda NU, semisal Fajru Falah, Masdar Farid Mas'udi, Muhammad As Hikam dli.

Sementara KH Yusuf Hasyim, melihat masih banyak penyimpangan terhadap semangat khittah sangat berkaitan dengan belum lengkapnya petunjuk pelaksanaan khittah itu sendiri.<sup>8</sup> Lebih jauh, permasalahan itu agaknya juga disebabkan oleh ketiadaan perangkat yang mampu menjabarkan program lima tahunan NU ke dalam kegiatan-kegiatan operasional dari tingkat pusat sampai keranting-ranting. Akibatnya, banyak program-program itu hanya berhenti pada rumusan ideatif. Karena itu, Muktamar ke-28 yang kemudian dilaksanakan di Yogyakarta, Nopember 1989, merupakan momentum yang tepat untuk menilai kembali semua program yang ada. Hanya saja Muktamar ini kembali menjadi ajang konstitusional bagi keinginan untuk men-

Tempo, 3 September 1966, No. 27.

dongkel Abdurrahman Wahid dari jabatan Ketua Taufidziyah. Posisi Abdurrahman kian dipersulit dengan munculnya nama Idham Chalid dalam bursa calon Rais Aam. Kelompok politisi, yang segera berbaris rapat di belakang Idham, seolah mendapat angin bahwa kehadiran tokoh politisi NU yang piaawai ini akan memouka celah yang sekali lagi dapat dimanfaatkan untuk membuka jalan bagi keinginan mereka yang sempat kandas.<sup>9</sup> Peluang Idham memang tampak cukup besar. Posisinya disimpan ketika ia terpilih kembali sebagai *Mudir Aam Jam'iyyah Ahlit-thariqah al-Hutubarah* dalam Muktamaranya di Demak Jawa Tengah, hanya tiga hari sebelum dimulainya muktamar NU di Krupyak, Yogyakarta. Pemilihan waktu yang sangat dekat ini agaknya disengaja agar Idham bisa mudah mengkonsolidasi pendukungnya menghadapi persinggan di Krupyak. Namun kuatnya posisi Idham ini tidak lalu berarti bahwa sayap politisi NU bisa berharap banyak. Muktamar Krupyak justru menjadi forum penegasan kembali keputusan Muktamar Situbondo. Hal ini bukan saja menjadi arus besar dalam NU, namun juga secara lais didukung oleh elit politik nasional. Tidak kurang dari Mendagri Rudini, Menag Munawir Sjadjali, dan bahkan Ketua Umum Golkar Wahono, telah melontarkan harapan agar

<sup>9</sup> Ibid., II, 30-32.

Muktamar NU ini dapat menegaskan keputusan kembali ke khittah.<sup>10</sup> Selanjutnya, meskipun Abdurrahman Wahid mesti menghadapi dua kelompok yang menentangnya, tapi dukungan baginya tidak kalah besar. Abdurrahman memang tidak memiliki kelompok pendukung khusus tertentu, namun ia telah membangun popularitas yang luas di daerah-daerah dengan banyak melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah dan cabang-cabang NU. Popularitas lainnya didukung oleh perannya sebagai cendikiawan dan kolumnis yang sering hadir di berbagai seminar atau diskusi. Ia bukan hanya didukung oleh kalangan muda NU, Namun Kiai senior pun menjagokannya. Dukungan terpenting datang dari Rais Asm KH Achmad Siddiq dan Shahibul Bait Muktamar KH Ali Maksum. Dalam pertemuan Syuriah NU Jawa Timur di Probolinggo, 14 Nopember, Kiai Achmad secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Abdurrahman Wahid sebagai calon Ketua Umum PBNNU, di samping menyatakan kesedianya untuk dicalonkan kembali sebagai Rais Asm.<sup>11</sup>

Terlepas dari adanya persoalan yang mengitari proses pencalonan mereka kembali, namun secara obyektif duet Abdurrahman-Achmad agaknya merupakan figur paling

10<sup>3</sup> A. Karim, op.cit., p. 125.

Il Tempo, 2 December 1909, n. 24.

tepat untuk memimpin NU. Mereka memiliki latar belakang yang kosmopolit, karenanya tidak canggung dalam mengantisipasi modernisasi. Sementara mereka pada saat yang sama juga memiliki akar kuat dalam tradisi ke-NÜ-an, maka mereka menjadi sangat paham bagaimana mengkomunikasikan proses modernisasi dalam idiom-idom yang dipahami oleh warga NU sendiri. Sementara untuk memasuki era berbangsa secara utuh, sesuatu yang dalam rawasan keislaman telah diback up dengan konsep *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan), maka mereka lah yang paling mampu berdialog dengan berbagai pihak dari berbagai latar-belakang yang beraneka ragam.

#### B. Menuju Reorientasi Politik NU

Keputusan organisasi NU untuk kembali pada khittah 1926, yang ditandai dengan melepaskan keterikatan baju politik praktis, bisa dilihat sebagai strategi untuk menghadapi realitas yang ada. Perlu dicatat di sini bahwa perdebatan-perdebatan yang berlangsung sebelum Muktamar NU ke-27 di Sitbono menandai keputusan itu lahir dari proses panjang termasuk di dalamnya wacana publik (*public discourse*) di mass media dan forum-forum diskusi. Hal ini, satu sisi mengusahakan pemecahan persoalan internal. Lain pihak menunjukkan kemampuan

organisasi ini untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang akan berdampak luas bagi perkembangan NU sendiri. Lebih dari itu, NU menjadi organisasi sosial keagamaan yang berpotensi untuk bermanuver secara mandiri di tengah organisasi sosial di Indonesia mengalami kemacetan, kooptasi dan ketergantungan yang besar pada negara.

Setelah NU kembali menjadi organisasi sosial keagamaan dan memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan, bukan berarti NU menjadi penonton di luar arena percaturan politik. Justru sebaliknya. Organisasi ini dalam konteks politik Orde Baru malah dianggap oleh para pengamat berhasil menempatkan posisi yang lebih strategis. Sebagai wacana praksis politik, NU kembali ke khittah 1926 dapat dilihat sebagai strategi untuk memperluas kembali ruang politik (*political sphere*) yang semakin menyempit di bawah dominasi negara. Alhasil NU kini tampak lebih bebas dalam menyalurkan aspirasi politik, lewat semua peserta Organisasi Peserta Pemilu (OPP). Kendati pada arus politik mutakhir, di era reformasi pasca lengsernya rezim Orde Baru, NU turut serta mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, tapi hal ini bisa dilihat sebagai salah satu hasil refleksi NU dalam upaya kembali ke khittah yaitu perumusan kembali pemahaman terhadap politik dan agenda

organisasi dalam aktualisasinya. Dalam wacana khittah, visi politik NU tentang Indonesia adalah "politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir bathin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat".<sup>12</sup> Selanjutnya, tindakan politik bagi NU antara lain berarti, pengembangan nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis..., yang harus dilandasi dengan moral, etika dan budaya berdasarkan asas Pancasila dan ditujukan untuk memperkokoh konsesus-konsesus nasional, tanpa harus mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.<sup>13</sup>

Dari refleksi wacana politik di atas terlihat upaya NU untuk melakukan rekonstruksi baik ideologis maupun kehidupan praksis dalam konstelasi politik di bawah Orde Baru setelah mengalami konflik internal yang akut--hampir

<sup>12</sup>Pesan-pesan Muktarar NU ke-27 mengenai masalah-masalah Masyarakat, Bangsa dan Negara. Dikutip dari Lampiran II buku Kacung Marjan, Guru Vadis no; Setelah Kembali ke Khittah 1926 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993) h. 383.

137 Knob

ideologis NU berangkat dari kerangka ajaran Islam, yang memiliki nilai universal mengatasi ruang dan waktu. Namun visi tersebut kemudian diletakkan dalam suatu konteks historis dan struktural yang konkret agar senantiasa relevan, aktual dan mampu menjadi landasan tumpu bagi keberadaannya.

Salah satu implikasi dari refleksi ideologis tersebut adalah penolakan tegas organisasi ini untuk mempertentangkan antara Islam dan Negara yang berdasarkan appropriasi pemahaman fundamentalistik dan pendekatan legal formalistik dalam upaya legitimasi ideologis dan praksis politik. Pendangan fundamentalistik tentang hubungan agama dan negara memiliki latar kesejarahan yang cukup panjang di Indonesia, bukannya tidak pernah diterima oleh NU atau setidaknya NU pernah pula berada dalam posisi mendukung, seperti dalam sidang-sidang konstituante yang memperdebatkan tentang dasar negara RI.<sup>14</sup> Demikian juga sikap-sikap wakil-wakil NU di DPR dalam menghadapi kasus seperti aliran kebatinan dan asas tunggal yang menunjukkan masih kuatnya elemen-elemen

<sup>14</sup> Sikap NU dalam sidang Konstituante diuraikan oleh Chairul Anam, *Profil Nahdlatul Ulama Sebagai Organisasi Sosial Keagamaan Yang Berniluan Ainiusunnah* (Skripsi: Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 1985) h. 316-319.

ideologis yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pemahaman legal formalistik.

Pada arus praksis, rumusan NU di atas menandai upaya reorientasi model kepolitikan dari yang hanya bersifat taktis menuju sebuah praksis politik yang substansial dan strategis. Seperti, didirikannya sejumlah program NU yang menuju pada arus pemberdayaan sumber daya manusia. Yaitu, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LKPSM), di bawah PWNU DIY, dan Lakpesdam yang merintis pembuatan Pusat Dokumentasi NU.

Menjadi jelas bahwa upaya reorientasi ideologi dan praksis yang tertulis dalam wacana politik baru NU muncul sebagai hasil dari proses dialektis antara kekuatan masyarakat dan negara. Di satu pihak, NU mencerminkan suatu upaya penemuan kembali identitas (*the recovery of identity*) yang meliputi penafsiran ulang perangkat-perangkat penting yang dipakai sebagai landasan bergerak organisasi dan juga upaya redefinisi peran dan fungsinya dalam struktur politik-ekonomi yang ada. Dipihak lain juga merupakan jawaban strategis terhadap perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh perombakan mendasar dalam format politik-ekonomi Indonesia di bawah Orde Baru yang tak lagi menempatkan NU dalam posisi yang semakin melemah dan defensif.